

## **ANALISIS PENERAPAN *ELECTRONIC GOVERNMENT* DI KABUPATEN PATI**

Sri Purwandani  
Maesaroh  
Rihandoyo

Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro  
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang

### **ABSTRAK**

Analisis Penerapan *Electronic Government* di Kabupaten Pati

Penerapan *electronic government* di Kabupaten Pati yang belum dapat berjalan secara maksimal telah mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan *Electronic Government* di Kabupaten Pati**”. Permasalahan utama di dalam penelitian ini ialah : Bagaimana penerapan *electronic government* di Kabupaten Pati? Apakah faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pengembangan *electronic government* di Kabupaten Pati? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan *electronic government* di Kabupaten Pati dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat penerapan tersebut. Upaya menjawab permasalahan dan tujuan penelitian dilakukan dengan menggunakan elemen sukses pengembangan *e-Government* menurut *Harvard JFK School of Government* antara lain *support*, *capacity*, dan *value*. Selain itu, juga menggunakan elemen sukses pengembangan *e-Government* menurut Moon dalam Sistem Informasi Manajemen yang terdiri dari *willingness* dan *local culture*. Data di dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan penerapan *electronic government* di Kabupaten Pati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-Government* di Kabupaten Pati belum dapat berjalan secara maksimal karena terdapat faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi perkembangannya. Belum ada *support* di dalam penerapan *e-Government* dengan tidak adanya *political will* dari pemerintah. *Capacity* yang sangat terbatas dengan sumber daya finansial, infrastruktur teknologi informasi dan sumber daya manusia yang kurang memadai. Tidak adanya *willingness* masyarakat Kabupaten Pati di dalam memanfaatkan fasilitas *e-Gov* serta adanya *local culture* dari masyarakat yang lebih menyukai cara manual daripada menggunakan media elektronik di dalam melakukan berbagai pekerjaan. Saran yang dapat diberikan guna meningkatkan kualitas pengembangan *e-Government* di Kabupaten Pati antara lain dengan mengadakan sosialisasi pemanfaatan IT di lingkungan pemerintahan secara berkala, mengadakan kerjasama yang lebih luas dengan sektor swasta, peningkatan jumlah sarana prasarana infrastruktur, peningkatan SDM pegawai melalui pelatihan, serta

sosialisasi secara kontinyu kepada masyarakat tentang keberadaan *e-Government* dan pemanfaatannya.

**Kata kunci :** *e-Government*, elemen sukses

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Electronic Government* atau *e-Gov* merupakan bentuk dari implementasi penggunaan teknologi informasi bagi pelayanan pemerintah kepada publik. Pengembangan *e-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip dari *New Public Management* (NPM). Definisi dari *Electronic Government* (*e-Gov*) itu sendiri menurut Bank Dunia (*World Bank*) adalah penggunaan teknologi informasi (seperti *Wide Area Network*, Internet dan *mobile computing*) oleh pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan (<http://www.kepriprov.go.id>, diakses pada 17 Oktober 2010).

Paradigma pelayanan pemerintah yang bercirikan pelayanan melalui birokrasi yang lamban, prosedur yang berbelit, dan tidak ada kepastian berusaha diatasi melalui penerapan *e-Government* ini. Penyampaian pelayanan kepada publik di dalam paradigma *e-Government* tidak lagi dilakukan melalui dokumen-dokumen dan interaksi personal melainkan sudah dilakukan melalui elektronik sehingga tidak ada lagi interaksi personal di dalam pemberian pelayanan. Orientasi efisiensi biaya produksi di dalam pemberian pelayananpun telah bergeser kepada orientasi yang menekankan pada fleksibilitas, pengawasan, dan kepuasan pengguna (*customer*) yang merupakan prinsip dari *new public management* (NPM).

Di Indonesia inisiatif ke arah *electronic government* telah diperkenalkan sejak tahun 2001 melalui Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat

pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi. Kemudian keluarnya Instruksi Presiden RI No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* merupakan langkah serius Pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di dalam proses pemerintahan dan menciptakan masyarakat Indonesia yang berbasis informasi.

Namun, di dalam perkembangannya, *electronic government* mengalami perkembangan yang *stagnant*. Setelah dikeluarnya Inpres ini dapat dikatakan bahwa perkembangan implementasi *e-Gov* masih jauh dari harapan. Masih banyak lembaga pemerintah, baik di pusat maupun daerah, yang belum menganggap *e-government* sebagai prioritas. *Electronic government* hanya dipandang sebagai proyek yang harus diikuti dan menjadi *trend* di kalangan pemerintahan.

Kabupaten Pati merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang telah menerapkan *electronic government* di dalam menjalankan urusan pemerintahannya. Pembangunan *e-Government* di Kabupaten Pati sendiri tergolong masih baru. Pembangunan *e-Gov* dimulai pada tahun 2009 dan mulai efektif sejak tahun 2010 di bawah pengelolaan Bidang Kominfo, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Pati sebagai unsur yang bertanggungjawab di dalam pembangunan dan pengembangan *electronic government* di Kabupaten Pati. Di Tahun Anggaran 2010 inilah pembangunan *electronic government* mulai berjalan efektif sebagai pelaksanaan dari Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peran Pemerintah Kabupaten Pati sebagai Badan Publik yang menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik diharapkan dapat berjalan maksimal dengan dibangunnya website resmi pemerintah, [www.patikab.go.id](http://www.patikab.go.id).

Namun, di dalam perkembangannya, penerapan *electronic government* di Kabupaten Pati ini menghadapi berbagai kendala sehingga belum dapat berjalan secara maksimal. Menurut pendapat Iwan Trisno, SH, MM, Kasi Penelitian Kantor Litbang Kabupaten Pati, menyebutkan bahwa penerapan dan pengelolaan *e-Government* di Kabupaten Pati belum dapat berjalan dengan baik,

“penerapan dan pengelolaan *e-Government* yang dilakukan di Kabupaten Pati belum dapat berjalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik. Masing-masing SKPD saling berlomba untuk menjadi yang terdepan di dalam penerapan *e-Government*. Tetapi tidak sedikit pula yang apatis terhadap adanya *electronic government* ini”.

Masing-masing instansi di Kabupaten Pati membuat sebuah media komunikasi dan informasi berbasis internet atau website dengan format dan *content* yang beragam sesuai dengan tupoksinya, misalnya, [www.pati-trade.com](http://www.pati-trade.com) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, [www.bappedapati.org](http://www.bappedapati.org) dari Bappeda, [www.dinkes-pati.com](http://www.dinkes-pati.com) dari Dinas Kesehatan, [www.litbang.patikab.go.id](http://www.litbang.patikab.go.id) dari Kantor Penelitian dan Pengembangan, dan masih banyak instansi lainnya yang berjalan sendiri-sendiri dan saling berlomba untuk menjadi yang terdepan di dalam pengembangan *e-Gov* (<http://iwantrisno.wordpress.com>, diakses pada 14 Oktober 2011).

Hasil *prasurvey* yang telah dilakukan oleh peneliti juga menunjukkan bahwa berbagai permasalahan di dalam penerapan *e-Government* di Kabupaten Pati antara lain belum adanya peraturan daerah yang secara rinci mengatur tentang penerapan *e-Government* di Kabupaten Pati. Peraturan perundang-undangan merupakan landasan normatif yang memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan sebagai sumber kewenangan yang harus diemban oleh pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Bukti keseriusan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pati sejauh ini belum menunjukkan adanya unsur *political will*. Belum adanya kemauan yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pati di dalam mendukung penerapan *e-Government* di Kabupaten Pati. Yonathan Eko Saputro, staf Subbidang Umum dan Kepegawaian Dishubkominfo Kabupaten Pati, menyatakan bahwa belum ada Peraturan Daerah Kabupaten Pati yang

mengatur secara rinci tentang pembangunan dan pengembangan *e-Gov* di Kabupaten Pati,

“hingga saat ini kami masih mengacu kepada UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Belum ada Peraturan dari Bupati yang mengatur pembangunan *e-Gov*”.

Belum ada tindak lanjut dari Pemerintah Daerah untuk membuat peraturan mengenai pelaksanaan *e-Government* di Kabupaten Pati. Pembangunan *electronic government* yang dilakukan di Kabupaten Pati masih berpedoman pada Undang-undang U No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selain unsur *political will* dari Pemerintah Daerah, adanya sosialisasi juga memegang peranan yang penting di dalam mendukung teraplikasikannya *e-Government* di Kabupaten Pati. Jika masyarakat tidak mengetahui tentang adanya penerapan *e-Government* ini, maka pemerintahan elektronikpun dapat dikatakan belum dapat berjalan maksimal karena tujuan utama dari diterapkannya *e-Gov* ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien kepada masyarakat. Hasil *prasurvey* menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat Kabupaten Pati mengetahui tentang adanya penerapan *e-Government* di Kabupaten Pati. Belum adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai penerapan *e-Government* ini menyebabkan masyarakat di Kabupaten Pati belum dapat merasakan manfaat dari diterapkannya *e-Gov* di Kabupaten Pati. Hal ini juga mempengaruhi kemauan masyarakat di dalam menggunakan fasilitas pelayanan yang disediakan di dalam penerapan *e-Gov* tersebut.

Sumber daya finansial merupakan hal yang krusial di dalam mendukung penerapan *e-Government* karena setiap kegiatan pasti membutuhkan biaya/ anggaran. Penerapan *e-Gov* membutuhkan anggaran yang besar, oleh sebab itu, dibutuhkan komitmen dari pemerintah di dalam menyediakan anggaran. Anggaran yang dibutuhkan tidak hanya berkaitan dengan biaya infrastruktur, tetapi juga untuk penambahan pengetahuan/ pelatihan pegawai di dalam penyediaan data layanan, penambahan dan perawatan alat-alat pendukung, dan biaya lain-lain. Anggaran pelaksanaan *e-Government* di Kabupaten Pati diperoleh dari dana

APBD Kabupaten Pati. Namun, sumber daya finansial/ anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di dalam mendanai penerapan *e-Government* di Kabupaten Pati masih terbatas, sebagaimana diungkapkan oleh Yonathan Eko Saputro,

“karena belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelaksanaan *e-Gov* ini, sumber anggaranpun belum dapat dialokasikan secara maksimal”.

Selain dukungan sumber daya finansial, ketersediaan sumber daya manusia atau pegawai yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan di dalam penerapan *e-Government* sangat mempengaruhi kesuksesan penerapan *e-Government* pada suatu daerah agar dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan. Tanpa adanya kemampuan sumber daya manusia (SDM) di dalam menerapkan *e-Government*, maka pemerintahan yang berbasis elektronik ini tidak akan terlaksana secara maksimal. Berdasarkan *prasurvey* yang telah dilakukan di Bidang Kominfo, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Pati menunjukkan bahwa kuantitas pengelola *e-Government* yang mempunyai kemampuan dasar di bidang TI untuk melakukan *maintenance* dengan baik terhadap konten website Pemerintah Daerah Kabupaten Pati masih sangat kurang. Jumlah pegawai Seksi Pengolahan Data Elektronik (PDE), Bidang Kominfo yang bertanggungjawab di dalam pengelolaan dan pengembangan *e-Gov* di Kabupaten Pati hingga saat ini hanya terdiri dari empat pegawai.

Berdasarkan identifikasi berbagai permasalahan tersebut serta mengingat pentingnya penerapan *e-Government* di dalam pelayanan publik, maka peneliti ingin mengadakan penelitian mengenai penerapan *electronic government* di Kabupaten Pati. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *e-Government* yang telah dilakukan di Kabupaten Pati, diperlukan pengamatan serta pengkajian yang lebih lanjut. Atas dasar itulah penulis mengambil judul “**Analisis Penerapan *Electronic Government* di Kabupaten Pati**”.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka, masalah di dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *electronic government* di Kabupaten Pati?
2. Apakah faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pengembangan *electronic government* di Kabupaten Pati?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *electronic government* di Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pengembangan *electronic government* di Kabupaten Pati.

## 1.4 Kerangka Teori

### 1.4.1 Administrasi Publik

Miftah Thoha di dalam bukunya yang berjudul Ilmu Administrasi Publik Kontemporer yang dikutip dari pendapatnya di tahun 1999 menyebutkan bahwa paradigma ilmu administrasi publik dan manajemen pemerintahan telah banyak berubah dari yang sarwa negara ke sarwa masyarakat. Istilah administrasi publik dapat diartikan sebagai administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menjadi dan dibuat kebijakannya oleh pemerintah bersumber dari aspirasi, kebutuhan dan kepentingan rakyat atau masyarakat. Administrasi publik berperan untuk membuat agar kekuasaan yang lokusnya telah beralih itu dapat direalisasikan bagi kepentingan masyarakat (Thoha, 2008: 92).

Perubahan paradigma ini membawa pengaruh yang besar sekali di dalam tata kehidupan pemerintahan. Salah satu pengaruhnya antara lain ialah ditempatkannya rakyat pada posisi yang utama dalam mengukur keberhasilan

pelayanan birokrasi pemerintahan. Pelayanan terbaik kepada rakyat menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi (Thoha, 2008: 92).

#### **1.4.2 *New Public Management***

Salah satu paradigma administrasi publik yang menekankan pada pelayanan terbaik adalah *New Public Management* (NPM). Konsep *New Public Management* (NPM) merupakan suatu konsep yang ingin menghilangkan monopoli pelayanan yang tidak efisien yang dilakukan oleh instansi dan pejabat-pejabat pemerintah (Thoha, 2008: 75). Para pemimpin birokrasi diupayakan agar meningkatkan produktivitas dan menemukan alternatif cara-cara pelayanan publik berdasarkan perspektif ekonomi. Mereka didorong untuk memperbaiki dan mewujudkan akuntabilitas publik kepada pelanggan, meningkatkan kinerja, restrukturisasi lembaga birokrasi publik, merumuskan kembali misi organisasi, melakukan *streamlining* proses dan prosedur birokrasi, dan melakukan desentralisasi proses pengambilan kebijakan (Thoha, 2008: 75).

Sama halnya dengan pendapat Barzelay; Boston et al; Pollitt dan Bouckaert (dikutip oleh Thoha, 2008) yang menyatakan bahwa pimpinan eksekutif diwajibkan melakukan proses akuntabilitas terhadap tercapainya tujuan organisasi, menciptakan proses baru untuk mengukur peningkatan produktivitas kerja, dan melakukan *reengineering* sistem yang merefleksi terhadap kuatnya komitmen pada akuntabilitas publik (Thoha, 2008: 75).

Salah satu bentuk dari perwujudan NPM ini nampak di dalam fenomena administrasi melalui internet (Hoadley, 2006: 262). Visi penggunaan teknologi terkait potensi besar yang terbuka karena kemajuan teknologi informasi. Orang berpikir mengenai berlipatnya fungsi pelayanan publik dari para *pihak berwenang* terhadap warga negara melalui internet. Informasi detail dapat diakses dengan mudah setiap waktu. Hal ini harus dilihat sebagai satu penggantian fungsi pelayanan yang selama ini diberikan pegawai negeri. Sebagian besar komponen umum tidak lagi memberikan pelayanan secara langsung tetapi menyediakan satu administrasi yang dijalankan masyarakat secara *online*.

Dampak potensial pelayanan ini akan meningkatkan secara langsung kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Informasi tidak lagi menjadi komoditas langka melainkan sebuah komoditas yang diterima secara universal. Kontak langsung terhadap pemerintah seperti kunjungan fisik yang menjemukan serta membuang waktu ke kantor pelayanan publik tidak perlu lagi dilakukan. Lebih jauh lagi dapat menghilangkan “biaya” yang ada dimana-mana, penundaan dalam semua aspek pelayanan, kebutuhan interpretasi (yang mahal) atas peraturan, dsb (Hoadley, 2006: 263).

### **1.4.3 *Electronic Government***

Kombinasi antara buah pemikiran *New Public Management* (NPM) dengan pemanfaatan teknologi informasi yang nampak di dalam fenomena administrasi melalui internet ini telah melahirkan konsep aplikasi pemerintahan digital atau yang lebih populer disebut sebagai *Electronic Government*.

Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *e-Government* sebagai berikut :

*“e-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government”* (Indarjit, 2004: 2).

Di sisi lain, UNDP (*United Nation Development Programme*) mendefinisikan *e-Government* secara lebih sederhana, yaitu :

*“e-Government is the application of Information and Communication Technology (ICT) by government agencies”* (Indarjit, 2004: 2).

Sementara itu, vendor perangkat lunak terkemuka, SAP memiliki definisi yang cukup unik, yaitu :

*“e-Government is a global reform movement to promote Internet use by government agencies and everyone who deals with them”* (Indarjit, 2004:3).

Janet Caldw, Direktur *Institute for Electronic Government (IBM Corporation)* dari hasil kajiannya bersama *Kennedy School of Government, Harvard University*, memberikan sebuah definisi yang menarik, yaitu :

*“Electronic Government is nothing short of fundamental transformation of government and governance at a scale we have not witnessed since the beginning of industrial era”* (Indarjit, 2004: 3).

Menurut Indarjit (2004: 4), setidaknya ada tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi *e-Government*, yaitu masing-masing adalah :

1. Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (*modern*) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (*stakeholder*);
2. Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet);
3. Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama berjalan.

Sedangkan definisi formal dari Pemerintah Republik Indonesia, sebagaimana diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Keminfo) adalah pelayanan publik yang diselenggarakan melalui situs pemerintah dimana domain yang digunakan juga menunjukkan domain Pemerintah Indonesia yakni go.id. Sehingga berdasarkan definisi formal ini, walaupun ada website yang secara real dikelola oleh pemerintah dan digunakan untuk pelayanan publik namun apabila tidak ber-domain go.id maka tidak masuk klasifikasi *e-Government* (Strategi Pengembangan E-Government (E-Gov) Dalam Pelaksanaan Diseminasi Informasi Pemerintah Kota Palembang, 2009: 8-9).

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* menjelaskan bahwa pengembangan *e-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi.

**a. Manfaat *Electronic Government***

Al Gore dan Tony Blair secara jelas dan terperinci menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep *e-Government* bagi suatu negara (Indarjit, 2004: 5), antara lain :

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholder*-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*.
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholder*-nya untuk aktivitas keperluan sehari-hari.
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan tren yang ada.
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

**b. Elemen Sukses Pengembangan *Electronic Government***

Menurut hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK School of Government* (Indarjit, 2004: 15), untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah :

1. *Support*

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (*intent*) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep *e-Government*, bukan hanya sekedar mengikuti tren

atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *e-Government*. Tanpa adanya unsur “*Political Will*” ini, berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-Government* tidak akan dapat berjalan dengan baik. Yang dimaksud dengan dukungan di sini juga bukanlah hanya pada omongan semata, namun lebih jauh lagi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk hal-hal sebagai berikut :

- 1) Disepakatinya kerangka *e-Government* sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi.
- 2) Disosialisasikannya konsep *e-Government* secara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.

## 2. *Capacity*

Adanya kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian” *e-Government* terkait menjadi kenyataan. Ada tiga hal yang harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu :

- 1) Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-Government*, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial.
- 2) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, hal ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan *e-Gov*.
- 3) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *e-Government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

## 3. *Value*

Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (*supply side*). Berbagai inisiatif *e-Gov* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut. Dalam hal ini yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-Gov* bukanlah kalangan pemerintah

sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (*demand side*). Untuk itulah maka pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi *e-Gov* apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan *value* (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya.

Adapun elemen sukses pengembangan *e-Gov* lain yang dikemukakan oleh Moon (2008: 168) di dalam buku Sistem Informasi Manajemen karya Dr. Ir. Eko Nugroho yaitu *willingness* dan *local culture*. *Willingness* adalah kemauan. Kemauan di sini dapat diartikan sebagai komitmen yang muncul untuk melakukan sesuatu hal. Persepsi masyarakat akan ICT akan mempengaruhi kemauan menggunakan fasilitas ICT (Stevanus Wisnu.W, 2005: 3). Faktor *willingness* tersebut dapat terlihat dari adanya pengaruh *willingness* pada *e-Readiness* terhadap keberhasilan *e-Gov*. *e-Readiness* adalah pemeringkatan untuk menilai tingkat kesiapan suatu negara dalam pemanfaatan teknologi informasi, khususnya untuk pelaksanaan *e-Gov*. *e-Readiness* merupakan sebuah kondisi terkait dengan keberhasilan pengembangan *e-Gov*. Terdapat *stakeholders* yang terkait erat dengan penerapan *e-Gov* yaitu, pemerintah, masyarakat yang terdiri atas individu dan organisasi non profit dan profit. *e-Readiness* merupakan kesiapan *stakeholders* tersebut. Pendekatan pengukuran dilakukan dengan mengukur kemampuan dan kemauan *stakeholders* tersebut dalam konteks penerapan *e-Gov*. Pencapaian keberhasilan pemerintah untuk mencapai tahap *e-Gov* dalam tingkat tertentu dipengaruhi oleh *e-Readiness* pemerintah maupun masyarakat pengguna (Stevanus Wisnu W, 2005: 4).

Selain itu, faktor atau elemen sukses penerapan *e-Gov* juga dapat dipengaruhi oleh *local culture* atau budaya lokal yang mempengaruhi di dalam kesuksesan penerapan *e-Gov* terkait dengan kemampuan dalam memasyarakatkan transaksi elektronik. Begitu juga dengan kesiapan dari masyarakat pengguna, dimana berhubungan dengan kemampuan masyarakat di dalam menggunakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang terdapat di dalam penerapan *e-Gov* tersebut. Peran masyarakat di sini sangat memiliki pengaruh dalam pencapaian kesuksesan penerapan *e-Gov* (Nugroho, 2008: 168).

### c. Tahapan Pengembangan *Electronic Government*

Di dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* dijelaskan bahwa penerapan *e-Government* di setiap lembaga pemerintah mengacu kepada pentahapan pengembangan *e-Government* secara nasional, dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di setiap lembaga pemerintah yang mencakup :

1. Prioritas layanan elektronik yang akan diberikan;
2. Kondisi infrastruktur informasi yang dimiliki;
3. Kondisi kegiatan layanan saat ini;
4. Kondisi anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki.

Jangka waktu penerapan *e-Government* di setiap lembaga pemerintah bervariasi sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi tetap dalam kerangka rencana penerapan *e-Government* secara nasional.

Pentahapan dalam penerapan *e-Government* di setiap lembaga pemerintah mengikuti :

1. **Tingkat Persiapan**, antara lain :
  - 1) Pembuatan situs web pemerintah di setiap lembaga;
  - 2) Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia menuju penerapan *e-Government*;
  - 3) Penyediaan sarana akses publik antara lain dalam bentuk *Multipurpose Community Center* (MCC), Warung dan kios Internet, dan lain-lain;
  - 4) Sosialisasi keberadaan layanan informasi elektronik, baik untuk publik maupun penggunaan internal;
  - 5) Pengembangan motivasi kepemimpinan (*e-leadership*) dan kesadaran akan pentingnya manfaat *e-Government* (*awareness building*);
  - 6) Penyiapan peraturan pendukung.
2. **Tingkat Pematangan**, antara lain :
  - 1) Pembuatan situs informasi layanan publik interaktif, antara lain dengan menambahkan fasilitas mesin pencari (*search engine*), fasilitas tanya jawab dan lain-lain;

- 2) Pembuatan hubungan dengan situs informasi lembaga lainnya (*hyperlink*).
3. **Tingkat Pemantapan**, antara lain :
  - 1) Penyediaan fasilitas transaksi secara elektronik antara lain dengan menambahkan fasilitas penyerahan formulir, fasilitas pembayaran dan lain-lain;
  - 2) Penyatuan penggunaan aplikasi dan data dengan lembaga lain (interoperabilitas).
4. **Tingkat Pemanfaatan**, antara lain :
  - 1) Pembuatan berbagai aplikasi untuk pelayanan G2G (*Government to Government*), G2B (*Government to Bussines*) dan G2C (*Government to Community*) yang terintegrasi;
  - 2) Pengembangan proses layanan *e-Government* yang efektif dan efisien;
  - 3) Penyempurnaan menuju kualitas layanan terbaik (*best practice*).

### 1.5 Fenomena Penelitian

Pada penelitian kali ini, fenomena yang diteliti ditekankan pada penerapan *electronic government* di Kabupaten Pati. Penerapan *e-Government* di Kabupaten Pati masih belum dapat berjalan maksimal. Penerapan *e-Government* dapat dilihat melalui lima elemen sukses pengembangan *e-Gov*, dimana elemen-elemen tersebut merupakan hal yang harus dimiliki dan diperhatikan oleh sektor publik untuk dapat menerapkan konsep digitalisasi. Masing-masing elemen sukses tersebut yaitu *support*, *capacity*, *value*, *willingness* dan *local culture*. Demikian pula dengan penerapan *electronic government* di Kabupaten Pati yang dapat dianalisis melalui lima elemen sukses tersebut.

### **1.5.1 Support**

Elemen sukses pengembangan *e-Gov* yang pertama adalah *support*. *Support* diartikan sebagai hal-hal yang mendukung penerapan *e-Government* di Kabupaten Pati, antara lain :

1. Kesepakatan

Sejauh mana dukungan Pemerintah Kabupaten Pati di dalam memberikan prioritas terhadap pengembangan *e-Gov* di dalam kegiatan pemerintahannya.

2. Sosialisasi

Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati di dalam memperkenalkan konsep *e-Government* kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum serta bagaimana tanggapan masyarakat tentang penerapan *e-Government* tersebut.

3. Kontinuitas

Menunjukkan keberlanjutan dari penerapan *electronic government* di Kabupaten Pati yang mencakup perencanaan pengembangan *e-Gov* di Kabupaten Pati ke depan.

### **1.5.2 Capacity**

Elemen sukses pengembangan *e-Gov* yang kedua yaitu, *capacity*. *Capacity* ini diartikan sebagai kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat di dalam mewujudkan *e-Government*. Ada tiga hal yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati sehubungan dengan elemen ini, yaitu :

1. Sumber daya finansial

Bagaimana anggaran yang dialokasikan di dalam penerapan *e-Government* di Kabupaten Pati.

2. Infrastruktur teknologi informasi

Bagaimana ketersediaan infrastruktur teknologi informasi di Kabupaten Pati yang dibutuhkan di dalam penerapan *e-Government* serta kelengkapan fasilitas yang menunjang pelaksanaan *e-Gov* di Kabupaten Pati.

### 3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Menunjukkan bagaimana ketersediaan sumber daya manusia (SDM), dalam hal ini yaitu Pemerintah Kabupaten Pati, yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan di dalam mengelola serta mengakses teknologi informasi agar penerapan *e-Government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

#### **1.5.3 Value**

Elemen sukses selanjutnya adalah *value*. *Value* ini lebih diartikan kepada manfaat apa yang diperoleh dengan adanya implementasi *e-Government* baik bagi Pemerintah Kabupaten Pati maupun bagi masyarakat Kabupaten Pati, khususnya masyarakat pengguna *e-Gov* yang merasakan langsung manfaat dari penerapan *e-Government* tersebut.

#### **1.5.4 Willingness**

Elemen sukses pengembangan *e-Gov* yang keempat ialah *willingness*. Pengembangan *e-Gov* dipengaruhi oleh *willingness* (kemauan). Kemauan di sini diartikan sebagai sejauh mana kemauan masyarakat Kabupaten Pati di dalam menggunakan fasilitas pelayanan yang disediakan di dalam penerapan *e-Gov* Kabupaten Pati.

#### **1.5.5 Local Culture**

Selanjutnya, elemen sukses yang terakhir dari pengembangan *electronic government* adalah *local culture* atau budaya lokal. Budaya lokal ini diartikan sebagai budaya apa yang hidup di masyarakat Kabupaten Pati yang mempengaruhi persepsi masyarakat Kabupaten Pati akan teknologi informasi sehingga berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat Kabupaten Pati di dalam penggunaan teknologi serta penggunaan fasilitas-fasilitas pelayanan yang terdapat di dalam penerapan *e-Gov* di Kabupaten Pati.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penggunaan tipe deskriptif dimaksudkan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek yang diteliti (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan fenomena/ peristiwa yang ada di dalam penerapan *electronic government* di Kabupaten Pati sebagai bentuk pelayanan kepada publik yang menggunakan teknologi informasi di dalam pelaksanaannya.

### **1.6.2 Fokus Penelitian**

Penentuan fokus penelitian bertujuan untuk membatasi dan memperjelas ruang lingkup pembahasan sehingga sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, terdapat dua hal yang menjadi fokus penelitian, yaitu :

1. Penerapan *electronic government* di Kabupaten Pati.
2. Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pengembangan *electronic government* di daerah tersebut.

### **1.6.3 Lokus Penelitian**

Lokus penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana penelitian dilaksanakan. Penelitian kali ini dilaksanakan di Kabupaten Pati dan difokuskan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Pati yang beralamatkan di Jalan Panglima Sudirman No. 12 Pati, Jawa Tengah, sebagai unsur SKPD yang menjalankan urusan serta bertanggungjawab di dalam pembangunan *e-Government* di Kabupaten Pati. Pemilihan lokus didasarkan kepada alasan bahwa Kabupaten Pati merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang masih baru di dalam menerapkan konsep *electronic government*

di dalam kegiatan pemerintahanya, sehingga penulis tertarik untuk mendeskripsikan penerapan *e-Gov* di daerah tersebut.

#### **1.6.4 Subjek Penelitian**

Pada penelitian ini, teknik pemilihan informan yang akan digunakan peneliti adalah *purposive sample* yaitu, pengambilan dengan sengaja untuk memperoleh *key informan* atau orang-orang yang mengetahui dengan benar dan atau yang terpercaya. Pemilihan *key informan* dilakukan kepada orang-orang yang terlibat langsung dan mengetahui tentang penerapan *electronic government* di Kabupaten Pati. *Key informan* di dalam penelitian ini ialah :

1. Kepala Bidang Kominfo Dishubkominfo Kabupaten Pati.
2. Kepala Seksi Pengolahan Data Elektronik (PDE) Dishubkominfo Kabupaten Pati.
3. Staf Seksi Pengolahan Data Elektronik (PDE) Dishubkominfo Kabupaten Pati yang bertanggungjawab di dalam pengelolaan website Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.

Informan juga dipilih dari masyarakat dengan kriteria yaitu, masyarakat yang tinggal atau menetap di Kabupaten Pati yang pernah menggunakan fasilitas website Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.

#### **1.6.5 Instrumen Penelitian**

Instrumen utama penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri sebagai alat utama pengumpul data agar lebih mudah di dalam mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.

#### **1.6.6 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu, berupa teks, kata-kata tertulis, serta tindakan-tindakan yang menggambarkan atau merepresentasikan orang-orang dan peristiwa-peristiwa di tempat penelitian. Selain itu, juga digunakan data statistik yang bersifat mendukung data kualitatif yang ada.

### 1.6.7 Sumber Data

- **Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh atau diambil langsung dari sumbernya (subjek penelitian). Data primer di dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada informan yaitu, Kepala Bidang Kominfo Dishubkominfo Kabupaten Pati, Kepala Seksi Pengolahan Data Elektronik (PDE) Dishubkominfo Kabupaten Pati, Staf Pengolahan Data Elektronik (PDE) Dishubkominfo Kabupaten Pati yang bertanggungjawab di dalam pengelolaan website resmi Kabupaten Pati, serta beberapa masyarakat pengguna fasilitas *e-Gov* yang merasakan langsung manfaat dari penerapan *e-Government* di Kabupaten Pati.

- **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bentuk dari data sekunder ini bisa berupa catatan-catatan, buku-buku litelatur, koran, dokumen, laporan, dan sumber-sumber lainnya. Data sekunder ini dibutuhkan untuk melengkapi dan menunjang data primer yang berhubungan dengan permasalahan di dalam penelitian.

### 1.6.8 Teknik Pengumpulan Data

- **Wawancara Mendalam (*Indepth-Interview*)**

Wawancara mendalam adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para informan. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) maupun melalui tanya jawab secara langsung. Wawancara pun dapat berkembang ketika *interviewer* dapat menggali informasi yang lebih mendalam. Di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) kepada para *key informan* maupun informan lainnya.

- **Observasi**

Pada dasarnya teknik observasi digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan penilaian atas perubahan tersebut. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi ini dilakukan dengan mengamati langsung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Bidang Kominfo Dishubkominfo Kabupaten Pati.

- **Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan menggunakan instrumen berupa dokumen-dokumen, catatan-catatan, foto-foto, maupun laporan-laporan yang menunjang penelitian. Dokumentasi mempunyai fungsi yang dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk *forecasting*. Dokumen yang akan digunakan di dalam penelitian ini yaitu, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penerapan *electronic government* di Kabupaten Pati.

### **1.6.9 Analisis Data**

Analisis data yaitu, proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data (Lexy J. Moleong, 2010 : 280).

Tujuan dari analisis data adalah untuk mengungkapkan hal-hal berikut :

1. Data apa yang masih perlu dicari.
2. Pertanyaan apa yang perlu dijawab.
3. Metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru.
4. Kesalahan apa yang harus diperbaiki.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu, analisis dilakukan setelah dikumpulkan data melalui wawancara dan observasi secara langsung di lapangan. Analisis data terdiri dari tahapan antara lain :

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Dengan kata lain reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data.

#### 2. Penyajian Data

Dalam tahap ini berbagai data yang telah terkumpul dan dianggap penting selanjutnya digambarkan dalam bentuk deskripsi untuk mempermudah melihat gambaran keseluruhannya sehingga dapat membantu merumuskan kesimpulan yang tepat.

#### 3. Penarikan Kesimpulan

Tahapan terakhir dari analisis data adalah menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini tergantung pada besarnya kumpulan catatan di lapangan, penyimpanan, kecakapan, serta kejelian di dalam menganalisis data kasar tersebut. Adapun analisis data di dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Melakukan pengamatan terhadap *electronic government* yang telah diterapkan di Kabupaten Pati. Pengamatan dilakukan secara langsung di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Pati, khususnya pada Bidang Kominfo selaku penyelenggara serta pengelola *e-Gov* di Kabupaten Pati.
- 2) Melakukan wawancara kepada *key informan* dan informan lainnya seputar penerapan *e-Gov* di Kabupaten Pati.
- 3) Mendeskripsikan sejauh mana penerapan *electronic government* di Kabupaten Pati.
- 4) Menarik kesimpulan berdasarkan berbagai data yang telah di dapat.

## PEMBAHASAN

### 2.1 Elemen Sukses Penerapan *Electronic Government* di Kabupaten Pati

#### 2.1.1 *Support*

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki di dalam penerapan *electronic government* adalah *support* yaitu dukungan untuk diterapkannya *e-Gov*, baik dukungan dari pemerintah, masyarakat setempat, maupun pihak *stakeholder* atau swasta.

- Kesepakatan

Kesepakatan merupakan *political will* dari Pemerintah Kabupaten Pati yaitu keinginan untuk benar-benar menerapkan konsep *e-Government*. Tanpa adanya unsur *political will* ini, berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-Government* tidak akan dapat berjalan dengan baik. Di dalam penyelenggaraan *e-Government* di Kabupaten Pati peraturan perundangan atau regulasi yang digunakan sebagai dasar penerapan yang melandasi yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pati.
3. Keputusan Bupati Pati No. 32 Tahun 2008 tentang Tupoksi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Pati.
4. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pembangunan *e-Gov* di Kabupaten Pati berlatarbelakang dari Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika menjadi salah satu urusan wajib yang telah didesentralisasikan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota. Dalam rangka

memenuhi kewajiban tersebut Pemerintah Kabupaten sebagai badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Maka dari itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pati sehingga terbentuk Bidang Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang secara institusional sebagai bidang baru pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Pati yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan wajib di bidang komunikasi dan informatika yang kemudian tugas pokok serta fungsi tersebut tertuang di dalam Keputusan Bupati Pati No. 32 Tahun 2008 tentang Tupoksi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Pati. Dibentuknya Bidang Kominfo melatarbelakangi inisiatif pembangunan *e-Gov* yang dimulai sejak tahun 2009.

Pelaksanaan *e-Gov* menjadi semakin tegas setelah diberlakukannya Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berlaku efektif mulai tanggal 30 April 2010 yang menyebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik dan masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan dan penyelenggaraan sistem elektronik. Di tahun inilah pembangunan *electronic government* di Kabupaten Pati mulai efektif dengan mengacu kepada kedua undang-undang tersebut sebagai landasan yuridis dengan membangun situs website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati yakni [www.patikab.go.id](http://www.patikab.go.id).

Dari berbagai regulasi yang digunakan di dalam penerapan *e-Gov* di Kabupaten Pati belum terlihat adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pati yang khusus mengatur tentang pelaksanaan *electronic government* di Kabupaten Pati. Pembangunan *e-Gov* di Kabupaten Pati hanya berlandaskan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai dasar

penerapan, sehingga bukti adanya kesepakatan di dalam penerapan *e-Gov* terlihat kurang kuat.

- Sosialisasi

Sosialisasi konsep *e-Government* secara merata, kontinyu, dan menyeluruh merupakan hal yang harus dilakukan untuk mendukung suksesnya penerapan *e-Gov* di suatu daerah agar masyarakat maupun pemerintah dapat mengetahui tentang adanya penerapan *e-Gov* tersebut. Jika masyarakat terlebih pemerintah daerah sendiri tidak mengetahui adanya penerapan *e-Gov* tersebut, maka pemerintahan berbasis elektronik juga tidak dapat diaplikasikan secara maksimal karena pada hakekatnya tujuan dari diterapkannya *e-Gov* ini yaitu untuk mendekatkan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat melalui transparansi dalam rangka mewujudkan terciptanya *good governance* di Kabupaten Pati. Pemerintah Kabupaten Pati telah melakukan sosialisasi sebanyak dua di dalam memperkenalkan konsep *e-Government* kepada SKPD dengan mengumpulkan seluruh Kepala SKPD se-Kabupaten Pati bertempat di Kantor Kabupaten Pati dan di SMK Tunas Harapan Pati dengan pemateri dari Dishubkominfo.

Bentuk sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui website Kabupaten Pati itu sendiri serta media radio yang ada di Kabupaten Pati yaitu, radio Suara Pati dan Pass FM melalui *talkshow* dengan Kepala Bidang Kominfo, Dishubkominfo Kabupaten Pati sebagai narasumber. Sosialisasi yang telah dilakukan baik kepada pemerintah maupun masyarakat baru dilakukan dua kali. Adapun bentuk sosialisasi yang langsung mempertemukan antara pemerintah dengan masyarakat belum pernah dilakukan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran yang digunakan untuk melakukan sosialisasi secara berkelanjutan.

Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang keberadaan website resmi Kabupaten Pati [www.patikab.go.id](http://www.patikab.go.id), sehingga masyarakat pengguna website belum mencapai titik optimal. Masyarakat yang telah mengunjungi atau mengakses website

tersebut mengetahui dengan *googling* sendiri atau dari teman bukan mengetahui dari sosialisasi pemerintah.

- **Kontinuitas**

Kontinuitas menunjukkan keberlanjutan penerapan *electronic government* di Kabupaten Pati yang mencakup perencanaan pengembangan *e-Gov* di Kabupaten Pati ke depan. Bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Pati di dalam mengembangkan *e-Gov* ke depannya adalah dengan menyusun *blue print* atau buku induk *e-Gov* Kabupaten Pati yang merupakan strategi rencana pengembangan *e-Gov* di Kabupaten Pati hingga tahun 2015. Buku induk ini akan mengatur segala kebijakan pengembangan *e-Gov* Kabupaten Pati ke depan yang antara lain menyebutkan tentang pembangunan *hotspot area*, pengadaan *server* dan *brainware*, pelatihan SDM dan UKM serta mengatur kerjasama dengan pihak ketiga. Pengembangan *electronic government* akan difokuskan pada pengintegrasian seluruh SKPD di Kabupaten Pati dalam satu portal sehingga berbagai informasi maupun penyebaran data dapat terkoordinasi dalam satu *server* melalui Dishubkominfo. Draf tersebut telah disusun dan akan menjadi landasan yang cukup kuat untuk mendukung keberlanjutan (kontinuitas) dari penerapan *electronic government* di Kabupaten Pati.

### **2.1.2 Capacity**

Elemen kedua yang harus dimiliki ialah *capacity*. Penerapan *e-Government* sangat dipengaruhi oleh seberapa besar kemampuan (*capacity*) atau keberdayaan dari pemerintah setempat di dalam mewujudkan *electronic government*. Tanpa adanya dukungan kemampuan dari pemerintah terlaksananya *e-Government* akan menjadi suatu yang mustahil. Kemampuan yang sangat mempengaruhi terlaksananya penerapan *e-Gov* di Kabupaten Pati adalah sumber daya finansial, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, dan sumber daya manusia.

- Sumber Daya Finansial

Ketersediaan sumber daya yang cukup terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial merupakan salah satu hal terpenting untuk menunjang pelaksanaan berbagai inisiatif *e-Gov* di suatu daerah. Sumber daya finansial harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin karena tanpa adanya anggaran yang cukup maka implementasi *e-Gov* di suatu daerah akan menjadi mustahil. Terlebih untuk menerapkan *e-Government* sendiri dibutuhkan anggaran yang besar oleh sebab itu, dibutuhkan adanya komitmen dari pemerintah di dalam menyediakan sumber daya finansial tersebut. Sumber daya finansial dibutuhkan untuk mendukung tersedianya sumber daya lain yaitu infrastruktur teknologi informasi dan sumber daya manusia seperti halnya untuk penambahan pengetahuan/ pelatihan pegawai, penambahan dan *maintenance* alat, serta untuk biaya lainnya.

Sumber daya finansial di dalam penerapan *electronic government* di Kabupaten Pati telah ditetapkan di dalam APBD Kabupaten Pati dan sepenuhnya berasal dari dana APBD dalam bentuk pagu atau plafon karena disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Alokasi anggaran yang digunakan di dalam pembangunan *e-Gov* sangat terbatas dan tidak ada peningkatan anggaran yang cukup signifikan setiap tahunnya. Oleh sebab itu, anggaran hanya dapat difokuskan kepada pembangunan serta pengelolaan website yang berdampak pada tidak adanya anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana lainnya.

- Infrastruktur Teknologi Informasi

Infrastruktur teknologi informasi merupakan elemen penting di dalam penerapan *e-Government* karena merupakan *tools* di dalam pelaksanaannya. Tanpa adanya infrastruktur yang mendukung maka tidak mungkin suatu pemerintahan secara elektronik tercipta. Di dalam penerapan *electronic government* di Kabupaten Pati setiap tahunnya belum terdapat peningkatan pengadaan infrastruktur teknologi informasi. Di awal tahun 2012, di setiap SKPD telah terkoneksi jaringan tetapi belum dapat terintegrasi dan terkoordinasi dalam satu portal, masing-masing SKPD masih berjalan dengan menggunakan sub domain masing-masing. Berbagai penyebaran data maupun informasi belum dapat

dikoordinasikan dalam satu *server* melalui Dishubkominfo. Interaksi antar SKPD juga belum dapat dilakukan secara elektronik sehingga komunikasi tidak dapat dengan cepat dilakukan masih harus menggunakan cara manual seperti menggunakan surat-menyurat.

Topologi jaringan yang digunakan masih bersifat lokal internal SKPD (Dishubkominfo) yaitu menggunakan topologi jaringan *Local Area Network* (LAN) oleh sebab itu, seluruh SKPD belum dapat terhubung secara *online* (melalui komputer) yang memungkinkan *file* dan *printer sharing*, *remote desktop*, serta kemudahan di dalam *sharing* data lainnya. Pengadaan infrastruktur internal Dishubkominfo baik jumlah sarana prasarana pendukung maupun untuk *maintenance* alat masih sangat terbatas. Jumlah sarana prasarana baik *hardware* maupun *software* masih sangat kurang seperti kecepatan akses jaringan internet yang sangat terbatas dan perangkat komputer yang masih menggunakan *core 2duo*.

Penyediaan infrastruktur yang menghubungkan antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah telah membangun *hotspot area* di simpang lima Pati agar mempermudah masyarakat di dalam mengakses internet namun, di dalam pelaksanaannya juga mengalami kendala dengan terjadi kerusakan menara *hotspot* pada tahun 2010 ketika terjadi hujan petir. Akibat adanya kerusakan masyarakat yang hendak mengakses internet tidak dapat menikmati layanan fasilitas. Belum ada penanganan dari pihak pemerintah untuk mengatasi kerusakan tersebut.

Selain adanya *hotspot*, pemerintah telah membangun website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati yakni [www.patikab.go.id](http://www.patikab.go.id) di tahun 2010. Di dalam pengelolaannya, website telah di *update* secara regular. Web selalu di *update* setiap harinya karena telah memiliki aplikasi *updating* website. *Update* ini berupa berita terkini, artikel-artikel yang bermanfaat, serta informasi-informasi penting lain seperti, perayaan hari besar maupun kegiatan-kegiatan yang diadakan di Kabupaten Pati. Melalui website masyarakat dapat mengakses berbagai informasi seputar Kabupaten Pati dan dapat memberikan berbagai komentar, kritik, saran, maupun keluhan terhadap pemerintah melalui fasilitas yang telah tersedia.

- Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia atau pegawai yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan di dalam penerapan *e-Government* sangat mempengaruhi kesuksesan penerapan *e-Government* pada suatu daerah agar dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan. Tanpa adanya dukungan kemampuan sumber daya manusia di dalam menerapkan konsep *e-Government* maka pemerintahan yang berbasis elektronik tidak akan terlaksana secara maksimal. Untuk mengelola *e-Gov* dibutuhkan sumber daya manusia dengan kualifikasi pendidikan di bidang TI yang mempunyai keterampilan teknis penguasaan IT. Pada dasarnya setiap SKPD di Kabupaten Pati telah mempunyai teknisi yang menangani kebutuhan pengelolaan teknologi informasi akan tetapi, kuantitasnya masih sangat kurang karena hanya ada satu pegawai di tiap SKPD. SDM di Bidang Kominfo sebagai unsur yang bertanggungjawab di dalam pengelolaan *e-Gov* di Kabupaten Pati hingga saat ini masih sangat terbatas. Pegawai yang mengerti TI atau memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi hanya berjumlah dua orang dengan tingkat pendidikan D-III dan S1. SDM baik secara kualitatif maupun kuantitatif masih sangat kurang oleh sebab itu, di dalam pembangunan website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati menggunakan tenaga dari luar dan pengelolaan website hanya mampu sebatas *upload* data.

### 2.1.3 Value

Kunci kesuksesan penerapan *e-Government* yang ketiga ialah *value*. Berbagai kebijakan tidak akan diterapkan jika tidak mempunyai unsur *value* atau manfaat di dalamnya. Kebijakan penerapan *electronic government* mempunyai berbagai manfaat. Adapun penentuan manfaat yang diperoleh dengan adanya penerapan *electronic government* tidak ditentukan oleh pemerintah sendiri melainkan masyarakat yang berkepentingan. Manfaat yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Pati setelah diterapkannya *e-Gov* antara lain meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional pemerintah di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun *stakeholder* serta melalui website [www.patikab.go.id](http://www.patikab.go.id)

pemerintah dapat meningkatkan transparansi dalam rangka mewujudkan terciptanya *good governance* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Melalui website pemerintah dapat transparan kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan pemerintahan seperti berbagai program kerja, visi misi, serta berbagai produk hukum yang *dishare* melalui website sehingga masyarakatpun dapat mengontrol kinerja pemerintah sesuai dengan prinsip dari *good governance*.

Menurut hasil observasi, manfaat dari diterapkannya *e-Government* di Kabupaten Pati masih sebatas pada pemberian informasi seputar Kabupaten Pati secara cepat dan mudah. Melalui website resmi Kabupaten Pati [www.patikab.go.id](http://www.patikab.go.id) masyarakat pengguna layanan *e-Gov* mendapatkan berbagai informasi mengenai Kabupaten Pati. Masyarakat juga dapat berkomunikasi dengan pemerintah dengan memberikan berbagai kritik dan saran kepada pemerintah tanpa harus datang ke tempat melalui fasilitas yang telah tersedia pada website. Masyarakat yang dulu awam dengan kegiatan pemerintahan menjadi lebih mengerti dan mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah sehingga sekarang menjadi transparan. Namun, tidak semua masyarakat pengguna layanan *e-Gov* merasakan manfaat dari adanya fasilitas tersebut. Terbukti dari beberapa masyarakat yang menilai bahwa website belum memberikan informasi yang lengkap sehingga informasi yang ingin didapat tidak tersedia seperti produk hukum yang kurang lengkap dan tidak adanya data RKPD serta APBD Kabupaten Pati.

#### **2.14 Willingness**

Disamping ketiga elemen sukses di atas, terdapat elemen lain yang turut menentukan keberhasilan di dalam penerapan *electronic government* yaitu dari sisi masyarakat. Masyarakat sebagai objek dari diterapkannya *e-Government* merupakan elemen utama pendukung kesuksesan pelaksanaan *e-Government* di suatu daerah karena pada hakekatnya diterapkannya *e-Gov* guna meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi dari pemerintah kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pengembangan *e-Gov* dipengaruhi oleh *willingness* atau kemauan dari masyarakat di dalam menggunakan fasilitas pelayanan yang disediakan di dalam

penerapan *electronic government*. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat maka penerapan *e-Government* tidak akan berhasil. Masyarakat harus memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah tersebut secara maksimal.

Masyarakat yang menggunakan fasilitas *e-Gov* masih sangat terbatas. Hal tersebut dikarenakan kemauan masyarakat Kabupaten Pati di dalam menggunakan fasilitas *e-Gov* yang masih kurang. Kurang adanya kesadaran dari masyarakat untuk mendukung terlaksananya pemerintahan berbasis elektronik terbukti dari beberapa warga yang diwawancarai mengaku belum mengetahui maupun belum pernah mengunjungi [www.patikab.go.id](http://www.patikab.go.id) karena jarang mengakses internet. Hal lain yang menjadi penyebab terutama masyarakat cenderung mencari hiburan daripada untuk mengakses informasi publik. Terlepas dari warga yang tidak mengetahui atau tidak memiliki kemauan di dalam mengakses internet, ada juga masyarakat yang telah menjadikan internet sebagai kebutuhan sehari-hari. Internet dipandang sebagai suatu kebutuhan di dalam menunjang berbagai pekerjaan sehingga *willingness* atau kemauan terhadap pemanfaatan teknologi informasi tersebut sangat dominan.

### **2.1.5 Local Culture**

Budaya lokal yang hidup di masyarakat merupakan faktor penting yang mempengaruhi persepsi masyarakat akan teknologi informasi sehingga berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat di dalam pemanfaatan penerapan *electronic government* di suatu daerah. Selain kemampuan pegawai di dalam mengelola *e-Gov*, juga harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat di dalam pemanfaatan teknologi informasi. Namun, masyarakat Kabupaten Pati belum sepenuhnya melek komputer atau internet. Adapun masyarakat yang telah mengenal internet akan tetapi intensitas atau kemauan untuk mengaksesnya masih rendah. Tidak adanya kemauan mengakses internet ini disebabkan oleh budaya yang hidup di masyarakat bahwa masyarakat lebih menyukai cara manual daripada menggunakan media elektronik di dalam melakukan berbagai pekerjaan, terlebih pada kalangan masyarakat yang telah berumur. Masyarakat cenderung telah nyaman menggunakan cara yang manual, oleh sebab itu, tidak ada keinginan

untuk mempelajari komputer maupun internet karena beranggapan bahwa mereka tidak membutuhkan teknologi informasi tersebut. Hal ini juga dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Menurut observasi yang telah dilakukan, antara masyarakat yang sering mengakses internet dan tidak atau jarang mengakses internet tergantung pada umur dan profesi masyarakat tersebut. Mayoritas masyarakat desa yang berprofesi sebagai petani tidak dapat mengakses internet sehingga tidak mengetahui adanya website resmi Kabupaten Pati. Sedangkan masyarakat yang berprofesi pelajar/ mahasiswa dan pekerja kantoran sering mengakses internet dan membuka website resmi tersebut.

Budaya ini berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat Kabupaten Pati di dalam memanfaatkan fasilitas *electronic government* yang ada. Masyarakat tidak memiliki kemampuan di dalam teknologi informasi maka masyarakatpun tidak dapat memanfaatkan fasilitas *e-Gov* yang merupakan pelayanan dari pemerintah dengan berbasiskan teknologi informasi. Terlebih belum ada tindakan dari pemerintah untuk menambah kemampuan masyarakatnya di dalam memanfaatkan teknologi informasi.

## **2.2 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pengembangan *Electronic Government* di Kabupaten Pati**

### **2.2.1 Faktor Pendorong**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan memperlihatkan bahwa faktor pendorong keberhasilan *e-Government* di Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

- Kelembagaan

Kelembagaan berkaitan dengan keberadaan organisasi yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pembangunan dan pengembangan *electronic government*. Kelembagaan di Kabupaten Pati ditandai dengan dibentuknya Bidang Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang secara institusional sebagai bidang baru pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Pati yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan wajib di bidang komunikasi dan informatika yang kemudian tugas

pokok serta fungsi tersebut tertuang di dalam Keputusan Bupati Pati No. 32 Tahun 2008 tentang Tupoksi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Pati. Setelah dibentuknya Bidang Kominfo inisiatif pembangunan *e-Gov* telah dimulai sejak tahun 2009. Keberadaan unit pengelola tersebut memiliki struktur yang tertuang jelas di dalam peraturan daerah mengenai pembentukannya dan tupoksi yang sudah tertuang dengan jelas dalam produk hukum yang menaungi pembentukan lembaga tersebut. Adanya *political will* di dalam mengembangkan *e-Gov* juga ditunjukkan lembaga tersebut. Lembaga telah memandang bahwa *e-Gov* merupakan suatu keharusan bagi Pemerintah Daerah seiring dengan adanya perkembangan teknologi serta hakekat dari otonomi daerah bahwa masyarakat harus dilayani dengan sebaik-baiknya.

- Adanya Kontinuitas

Faktor pendorong penerapan *e-Gov* di Kabupaten Pati yang kedua ialah kontinuitas. Adanya keberlanjutan penerapan *electronic government* di Kabupaten Pati yang mencakup perencanaan pengembangan *e-Gov* di Kabupaten Pati ke depan. Adanya kontinuitas dibuktikan dengan sedang disusunnya *blue print* atau buku induk *e-Gov* Kabupaten Pati yang merupakan strategi rencana pengembangan *e-Gov* di Kabupaten Pati hingga tahun 2015. Buku induk ini akan mengatur segala kebijakan pengembangan *e-Gov* Kabupaten Pati ke depan yang antara lain menyebutkan tentang pembangunan *hotspot area*, pengadaan *server* dan *brainware*, pelatihan SDM dan UKM serta mengatur kerjasama dengan pihak ketiga. Pengembangan *electronic government* ke depannya akan difokuskan pada pengintegrasian seluruh SKPD di Kabupaten Pati dalam satu portal sehingga berbagai informasi maupun penyebaran data dapat terkoordinasi dalam satu *server* melalui Dishubkominfo. Draf tersebut telah disusun dan akan menjadi landasan yang cukup kuat untuk mendukung keberlanjutan (kontinuitas) dari penerapan *electronic government* di Kabupaten Pati.

### 2.2.2 Faktor Penghambat

Berbagai faktor pendorong pengembangan *e-Gov* di Kabupaten Pati juga menghadapi berbagai kendala yang menjadi faktor penghambat di dalam terselenggaranya pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Pati. Pemerintah Kabupaten Pati mempunyai beberapa kendala di dalam mengembangkan *e-Government* sehingga menghambat suksesnya penerapan *e-Gov* di Kabupaten Pati. Faktor-faktor penghambat tersebut merupakan kendala yang berasal dari internal SKPD (Dishubkominfo) sendiri sebagai pihak pengelola *e-Gov*, Pemerintah Kabupaten Pati, maupun faktor eksternal yaitu, masyarakat sebagai pengguna layanan fasilitas *e-Gov*. Adapun beberapa hambatan yang terjadi di dalam pengembangan *e-Government* di Kabupaten Pati, antara lain :

1. Belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pati yang mengatur tentang pelaksanaan *e-Gov* di Kabupaten Pati.
2. Belum adanya sosialisasi langsung yang mempertemukan antara pemerintah dengan masyarakat mengenai keberadaan website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.
3. Keterbatasan sumber daya finansial.
4. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi serta adanya kerusakan alat yang disebabkan cuaca buruk.
5. Keterbatasan sumber daya manusia pengelola *e-Gov*/ pegawai baik dari kualitas maupun kuantitas.
6. Keterbatasan kemampuan masyarakat di dalam memanfaatkan fasilitas *e-Gov* dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya melek komputer ataupun internet.
7. Budaya lokal masyarakat yang terbiasa menggunakan cara manual daripada menggunakan media elektronik di dalam melakukan berbagai pekerjaan.

## KESIMPULAN

*Electronic Government* adalah bentuk dari implementasi penggunaan teknologi informasi bagi pelayanan pemerintah kepada publik. Pengembangan *e-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Inisiatif penerapan *electronic government* di Kabupaten Pati telah dimulai di tahun 2009 dan mulai efektif sejak tahun 2010 di bawah pengelolaan Bidang Kominfo, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Pati sebagai unsur yang bertanggungjawab di dalam pembangunan dan pengembangan *electronic government* di Kabupaten Pati. Penerapan *e-Government* di Kabupaten Pati belum dapat berjalan secara maksimal. Hal tersebut diidentifikasi melalui sejauh mana terlaksananya elemen sukses pengembangan *e-Gov* yang terdiri dari *support, capacity, value, willingness* dan *local culture*.

Terdapat faktor-faktor pendorong maupun menghambat di dalam pengembangan *e-Government* di Kabupaten Pati. Faktor pendorong yaitu :

1. Dibentuknya Bidang Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai unsur yang bertanggungjawab di dalam penerapan *electronic government* di Kabupaten Pati yang secara institusional sebagai bidang baru pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Pati.
2. Adanya keberlanjutan dari penerapan *e-Gov* di Kabupaten Pati dengan disusunnya *blue print* atau buku induk *e-Gov* Kabupaten Pati yang merupakan strategi rencana pengembangan *e-Gov* di Kabupaten Pati ke depan.

Sedangkan faktor penghambat antara lain; tidak adanya *political will* dari pemerintah, berbagai keterbatasan baik dari sumber daya finansial, infrastruktur teknologi informasi, maupun sumber daya manusia pengelola *e-Gov/* pegawai. Selain itu, hambatan juga berasal dari sisi masyarakat dengan adanya keterbatasan kemampuan masyarakat di dalam memanfaatkan fasilitas *e-Gov* dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya melek komputer ataupun internet. Budaya lokal

masyarakat yang terbiasa menggunakan cara manual daripada menggunakan media elektronik di dalam melakukan berbagai pekerjaan juga merupakan salah satu hambatan di dalam pengembangan *electronic government* di Kabupaten Pati.

### DAFTAR PUSTAKA

- Indarjit, Richardus Eko. 2004. *Electronic Government*. Yogyakarta : Andi.
- Indarjit, Richardus Eko dkk. 2005. *E-Government In Action*. Yogyakarta : Andi.
- Hoadley, Mason C. 2006. *Quo Vadis Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Thoha, Miftah. 2010. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Chotimah, Siti. 2011. Analisis Penerapan *Electronic Government* pada Kabupaten Purworejo (Studi pada [www.patikab.go.id](http://www.patikab.go.id)). *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Putri, Arbiana. 2011. Penerapan *Electronic Government (E-Gov)* di Kabupaten Semarang. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Ppp, Arief, Retno Sunu Astuti. Implementasi E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Globalisasi.
- Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*.
- Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pati.

Keputusan Bupati Pati No. 32 Tahun 2008 tentang Tupoksi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Pati.

Artikel Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati Bidang Komunikasi dan Informatika (Kominfo). 2009 : Dishubkominfo Kabupaten Pati.

Proposal Pembangunan Sistem Informasi dan Dokumentasi untuk Mengelola Informasi Publik (*e-Government*). 2010 : Dishubkominfo Kabupaten Pati.

*The Grand Idea* Membangun Pemerintahan Kabupaten Pati Menuju *e-Government*. 2010 : Dishubkominfo Kabupaten Pati.

Strategi Pengembangan E-Government (E-Gov) Dalam Pelaksanaan Diseminasi Informasi Pemerintah Kota Palembang. 2009 : Diskominfo Kota Palembang dan Lepkadi Cabang Palembang.

Sumber lainnya :

<http://www.kepriprov.go.id> (diakses pada 17 Oktober 2010).

<http://iwantriso.wordpress.com/2009/02/13/penerapan-e-government-di-kabupaten-pati-apakah-bisa/> (diakses pada 14 Oktober 2011).

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26588/4/Chapter%20I.pdf> (diakses pada 14 Oktober 2011).

<http://rinoan.staff.uns.ac.id/2008/09/28/model-pelayanan-publik-menggunakan-m-government/> (diakses pada 10 Oktober 2011).

<http://meijana9ek.blogstudent.mb.ipb.ac.id/files/2012/01/TRANFORMASSI-E-GOVERNMENT.pdf> (diakses pada 17 Oktober 2010).

<http://www.scribd.com/doc/5446784/tugas-new-publikMangement> (diakses pada 15 Oktober 2010).

<http://www.biskom.web.id/2011/01/24/kepala-bppt-marzan-aziz-iskandar-bppt-siap-sukseskan-e-vote.bwi> (diakses pada 14 Oktober 2011).

[http://io.ppijepang.org/v2/index.php?option=com\\_k2&view=item&id=286:potret-dan-hambatan-e-government-indonesia&tmpl=component&print=1](http://io.ppijepang.org/v2/index.php?option=com_k2&view=item&id=286:potret-dan-hambatan-e-government-indonesia&tmpl=component&print=1) (diakses pada 14 Oktober 2011).

<http://www.wikimu.com/News/Print.aspx?id=13095> (diakses pada 14 Oktober 2011).

<http://ml.scribd.com/doc/87554682/Penerapan-E-Government-di-Indonesia>  
(diakses pada 1 November 2011).

<http://www.dudung.net/teknologi-informasi/6-strategi-menuju-e-government.html>  
(diakses pada 20 Oktober 2011).

[http://efriantoawi.multiply.com/journal?&show\\_interstitial=1&u=%2Fjournal](http://efriantoawi.multiply.com/journal?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal)  
(diakses pada 12 Oktober 2011).

[http://www.depdagri.go.id/media/filemanager/2011/09/14/a/1/alamat\\_website\\_provkabkota\\_seluruh\\_indonesia.pdf](http://www.depdagri.go.id/media/filemanager/2011/09/14/a/1/alamat_website_provkabkota_seluruh_indonesia.pdf) (diakses pada 1 November 2011).

<http://www1.patikab.go.id/> (diakses pada 5 Desember 2011).